



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440
Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712
Laman djpsdkp.kkp.go.id Email (psdkp.jakarta@kkp.go.id)

22 Januari 2021

Nomor : 041/Lan.3/RC.611/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj)
Tahun 2020

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Di –
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : 247/PSDKP.0.1/RC.611/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP Triwulan IV Tahun 2020 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di aplikasi Kinerjaku pada periode Tahun 2020 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) sebesar 110,31%. Atas pencapaian Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) sebesar 110,31% dengan kategori "**Baik**" (skor 90-120%) maka dapat disimpulkan pada periode Tahun 2020 capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta mengalami keberhasilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terimakasih.



Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H

Tembusan Yth:
1. Plt. Direktur Jenderal PSDKP;
2. Inspektur II Inspektorat Jenderal KKP.



LAPORAN KINERJA

Abstrak

"Laporan ini mencakup capaian kinerja dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020"

2020

EDISI

LAPORAN KINERJA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANA JAKARTA



Diterbitkan oleh :

Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440

Telepon : (021) 6614712

Laman : djpsdkp.kkp.go.id

Email : psdkp.jakarta@kkp.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta kepada Unit Kerja Eselon I Ditjen PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga sebagai media informasi pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun anggaran 2020 kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menetapkan 14 Sasaran Strategis (SS), yaitu: (1) Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas; (2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; (3) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; (4) Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas; (5) Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas; (6) Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); (7) Terselenggaranya perawatan kapal pengawas; (8) Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas; (9) Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas; (10) Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas; (11) Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan; (12) Terselenggaranya Penyidikan TPKP; (13) Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal; (14) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Sasaran strategi tersebut menetapkan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi acuan kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengawasan selama tahun 2020. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu :

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2020 sesuai DIPA Nomor : 032.05.2.440816/2020 tanggal 05 November 2019, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 55.222.271.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mengalami beberapa kali revisi sampai pada revisi terakhir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.231.816.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Capaian kinerja pada tahun 2020 sudah memenuhi target. 25 IKU yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta telah mencapai target sesuai rencana aksi. Berdasarkan nilai NPSS Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2020 memperoleh nilai 110,31% "**Baik**". Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 30.649.459.251,- "**95,09%**".

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.



Jakarta, 22 Januari 2021
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

Sumeno Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta	2
1.4. Wilayah Kerja.....	4
1.5. Armada Kapal Pengawas dan Speedboard Pengawas	5
1.6. Kepegawaian	6
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020.....	10
2.2. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta	11
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2020	13
2.4. Perjanjian Kinerja.....	14
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta	19
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020.....	19
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja.....	18
3.2.1 Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas.....	24
3.2.2 Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	25
3.2.3 Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan.....	29
3.2.4 Sasaran Strategis 4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas.....	32
3.2.5 Sasaran Strategis 5. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan <i>Speedboat/Rigid Inflatable/Rubber Boat</i>	34
3.2.6 Sasaran Strategis 6. Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	35
3.2.7 Sasaran Strategis 7. Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	36

3.2.8 Sasaran Strategis 8. Terselenggaranya perawatan <i>speedboat</i> pengawas	37
3.2.9 Sasaran Strategis 9. Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas.....	38
3.2.10 Sasaran Strategis 10. Terselenggaranya Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas.....	39
3.2.11 Sasaran Strategis 11. Terselenggaranya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi Kesehatan	42
3.2.12 Sasaran Strategis 12. Terselenggaranya Penyidikan TPKP	43
3.2.13 Sasaran Strategis 13. Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awk Kapal.	43
3.2.13 Sasaran Strategis 14. Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	44
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	51

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	52
4.2. Rekomendasi	52
4.3. Tindak Lanjut	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	6
Tabel 2.	Data Armada Kapal Pengawas	7
Tabel 3.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB	7
Tabel 4.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe <i>Speedboat</i>	7
Tabel 5.	Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	8
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020.....	14
Tabel 7.	Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi	19
Tabel 8.	Capaian IKU Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020	21
Tabel 9.	Capaian Persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS	24
Tabel 10.	IKU jumlah Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya	25
Tabel 11.	IKU persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa.....	29
Tabel 12.	Perhitungan penilaian kapal perikanan yang taat.....	30
Tabel 13.	Penerbitan HPK dan SLO periode triwulan I tahun 2020.....	30
Tabel 14.	Capaian persentase WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	32
Tabel 15.	Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Kapal Pengawas Tahun 2020	33
Tabel 16.	Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas	33
Tabel 17.	Capaian persentase WPPNRI yang dipantau menggunakan <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i> lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	34
Tabel 18.	Hasil operasi dan cakupan teoritis <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	34
Tabel 19.	Perhitungan persentase Cakupan WPPNRI <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	35
Tabel 20.	Capaian persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	36
Tabel 21.	Jumlah <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i> siap operasi	37
Tabel 22.	Kesiapan <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i> lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	37
Tabel 23.	Rekapitulasi jumlah kapal perikanan yang diperiksa kapal pengawas	38
Tabel 24.	Capaian IKU jumlah hari operasi kapal pengawas	39
Tabel 25.	IKU jumlah kapal perikanan yang diperiksa <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	40
Tabel 26.	Rekapitulasi hasil pemeriksaan kapal menggunakan <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	40
Tabel 27.	Capaian jumlah hari operasi <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	41
Tabel 28.	Rekapitulasi hasil operasi <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i>	41
Tabel 29.	IKU jumlah awak kapal pengawas perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin	42

Tabel 30. Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP	43
Tabel 31. Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk.....	43
Tabel 32. Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal.....	44
Tabel 33. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	45
Tabel 34. Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan I tahun 2020..	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta	4
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta	5
Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP- Jakarta	8
Gambar 4. Grapik sistem penyajian laporan kinerja	9
Gambar 5. Peta Strategi Pangkalan PSDKP Jakarta	12
Gambar 6. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem menejemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP	50
Gambar 9. Nilai kinerja anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta.....	50



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakrta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Desember 2020 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap terlarang (trawl dan arad) di beberapa daerah;
- b. Pelanggaran jalur dan daerah penangkapan ikan

- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bus, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Pengawasan terhadap ikan *Invasif* diantaranya ikan arapaima, alligator yang beredar di pusat perdagangan ikan hias;
- d. Penggunaan bahan tambahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan baik skala kecil maupun skala besar
- e. Penggunaan pakan dan obat ikan yang belum teregister pada usaha budidaya ikan;
- f. Masih ditemukannya penangkapan ikan yang dilindungi (Cites) oleh Nelayan
- g. Pencemaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha bidang perikanan maupun non perikanan
- h. Pengawasan kesesuaian peruntukan distribusi importasi selain kebutuhan bahan baku industri/bahan penolong industri masih sulit dilakukan;
- i. Kegiatan peredaran lobster/kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020.

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2020 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta setingkat Eselon III dan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Jabatan Fungsional. Unit Pangkalan PSDKP Jakarta, terdiri atas, 3 (tiga) subkoordinator dengan tugas dan fungsi masing - masing, sebagai berikut :

- a. Subkoordinator Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan serta pengelolaan saran dan prasarana pengawasan;
- b. Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Subkoordinator Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.

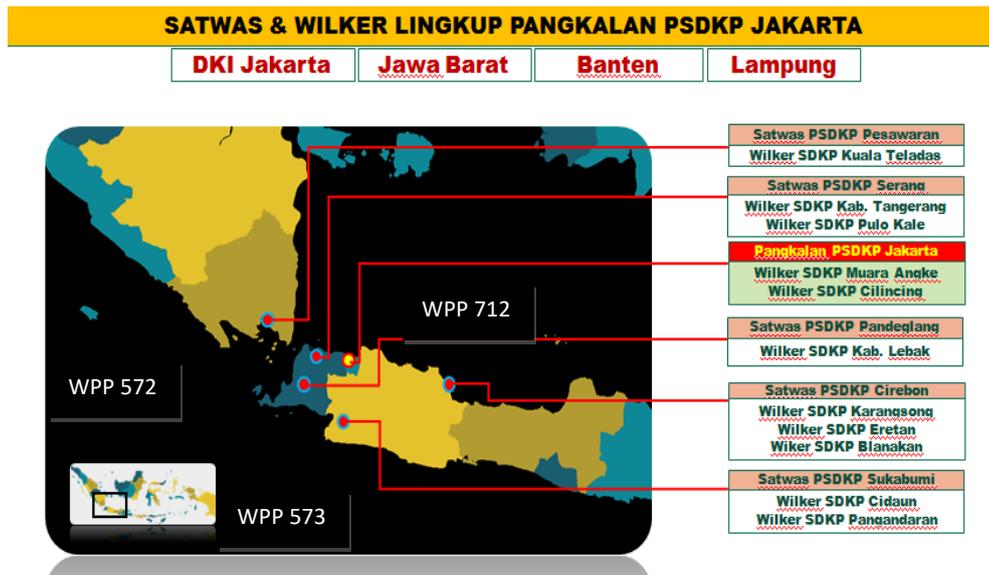


Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa.



Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Pangkalan PSDKP Jakarta dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Armada Kapal Pengawas dibawah koordinasi Pangkalan PSDKP Jakarta, yaitu KP. Hiu 10 dengan melakukan pengawasan kapal perikanan di laut dan apabila terdapat kapal perikanan yang diduga melakukan kegiatan perikanan *illegal*, kapal tersebut di *adhock* untuk diproses lebih lanjut oleh PPNS Pangkalan PSDKP Jakarta. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas D

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>RIB 2</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	6 meter
3	<i>Rubber Boat</i>	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas Tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter

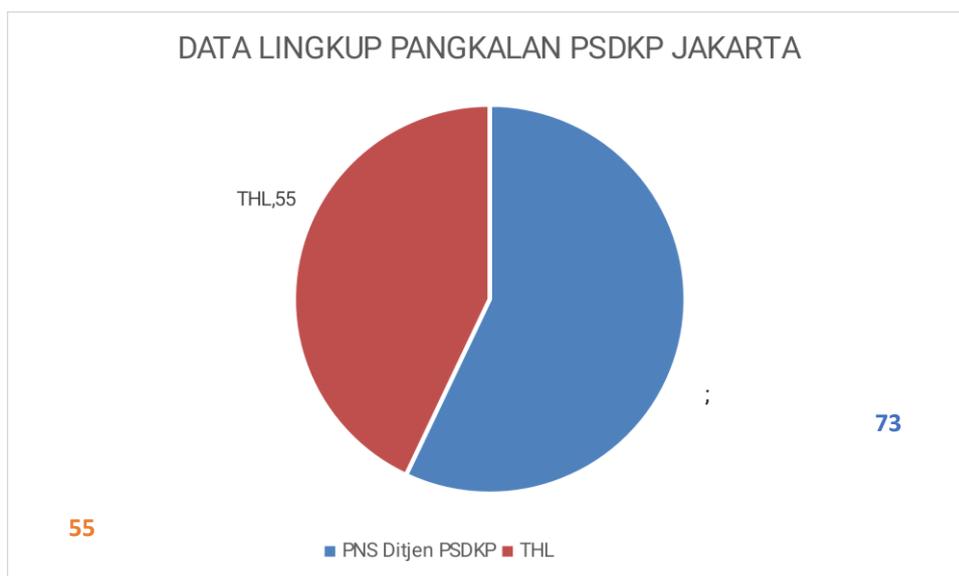
1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2020 berjumlah 150 orang yang terdiri dari PNS Ditjen PSDKP berjumlah 73 orang, PNS Dinas berjumlah 22 orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 55 orang, dengan dasar Keputusan Dirjen PSDKP No. 26/KEP-DJPSPDKP/2017 tentang Penetapan Pengawas Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	THL	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	38	32	70
2	ABK Kapal Pengawas	9	0	9
3	Satwas SDKP Pesawaran	4	3	7
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	3	6
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	5	7	12
7	Satwas SDKP Cirebon	10	7	17
Jumlah		73	55	128

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar 3.



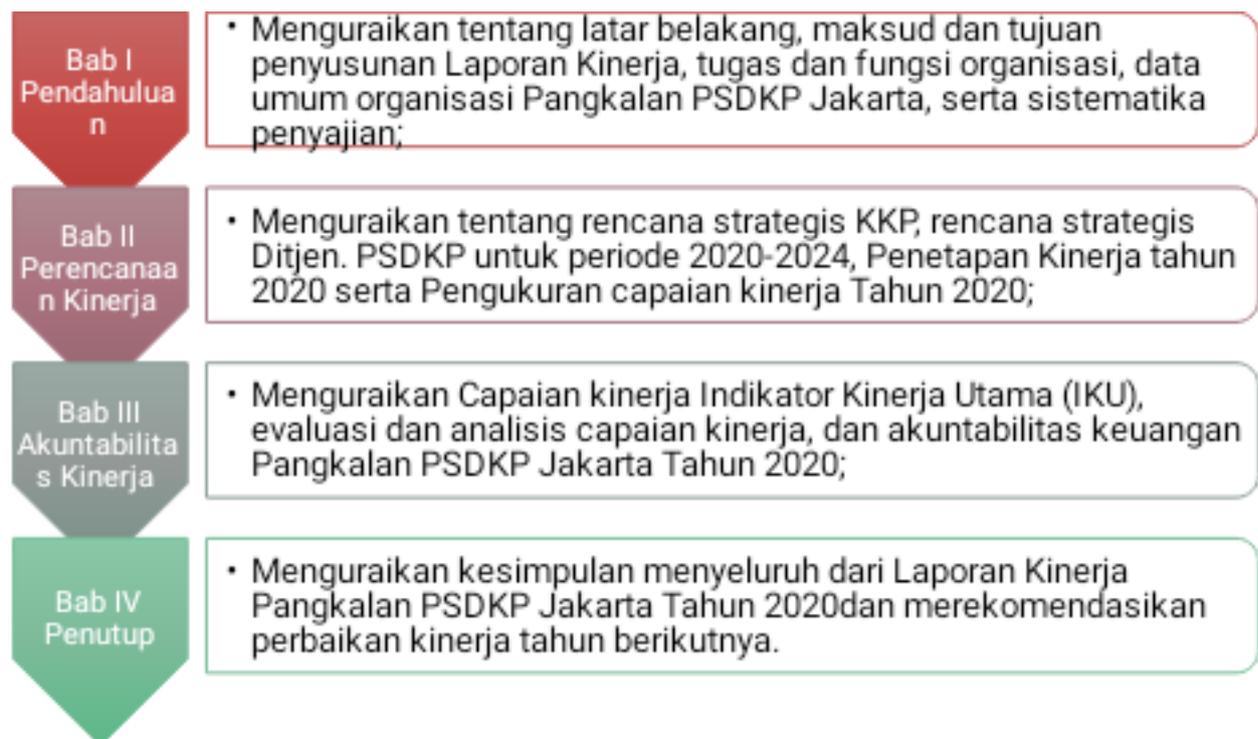
Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS baik dari Ditjen PSDKP maupun dari dinas daerah. Dengan adanya pegawai dari Pemerintah Daerah (dinas) yang dilibatkan dalam Pengawasan SDKP, maka dapat membantu pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.

Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020 diuraikan pada grafik berikut :



Gambar 4. Grapik sistem penyajian laporan kinerja



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2020.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang

utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan system informasi dan komunikasi pengawasan SDKP
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif d wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2020

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional *Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat*
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa *Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat*
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan *Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat*
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. *Speed Boat* Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Layanan Perkantoran

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja mengalami perubahan pada tanggal 9 September 2020, semula terdapat 28 IKU menjadi 25 IKU. Perjanjian kinerja telah mengalami revisi pada tanggal 9 September 2020, berikut perubahan pada perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta dapat dilihat pada tabel semula menjadi dibawah ini :

Tabel 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi

No.	Perubahan	Semula	Menjadi
1.	Sasaran Strategi (SS) 1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas
2.	Sasaran Strategi (SS) 2	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan
3.	Sasaran Strategi (SS) 3	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
4.	Sasaran Strategi (SS) 4	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas (SS 4)
			Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (SS 5)
			Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (SS 6)
5	Sasaran Strategi (SS) 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas (SS 7)
			Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas (SS 8)
6	Sasaran Strategi (SS) 6	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas (SS 9)
			Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas (SS 10)
			Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit) (SS 11)
7	Sasaran Strategi (SS) 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyidikan TPKP (SS 12)
			Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal (SS 13)
8	Sasaran Strategi (SS) 8	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (SS 14)

9	Target IKU 4	0,5 %	0.4%
10	IKU 10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)
11	IKU 11	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)
12	Target IKU 13	38 orang	34 orang
13	IKU 17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]
14	IKU 18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
15	IKU 19	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]	-
16	IKU 20	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
17	IKU 21	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)
18	IKU 22	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]
19	IKU 24	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]	-
20	IKU 25	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [%]	-
21	IKU 26	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]

		Perikanan [Indeks]	
22	IKU 27	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	IKU 25
23	IKU 28	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Jakarta dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP JakartaTA. 2019 [%]	-

Perjanjian kinerja revisi 9 September 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]	48
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,40
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,104
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP	1

	perawatan kapal pengawas	Jakarta (unit)	
8.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)	8
9.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90
		10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)	90
10.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	180
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)	24
11.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (orang)	34
12.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
13.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
14.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]	80
		18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal	100

	lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	
	20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
	21. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
	22. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]	72
	23. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90
	24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
	25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Baik [88]

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
SS1 Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas				
IKU 1	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	70	100	120
SS2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan				
IKU 2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]	48	155	120
SS3 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan				
IKU 3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
SS4 Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas				
IKU 4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,4	0,83	120
SS5 Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas				
IKU 5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	0,104	0,35	120
SS6 Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)				

IKU 6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	100	120
SS7 Terselenggaranya perawatan kapal pengawas				
IKU 7	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)	1	1	100
SS8 Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas				
IKU 8	Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)	8	8	100
SS9 Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas				
IKU 9	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90	113	120
IKU 10	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)	90	93	103
SS10 Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas				
IKU 11	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	180	574	120
IKU 12	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)	24	33	120
SS11 Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan				
IKU 13	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (orang)	34	38	112
SS12 Terselenggaranya Penyidikan TPKP				
IKU 14	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
SS13 Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal				
IKU 15	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	93
IKU 16	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	93

SS14 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta				
IKU 17	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	88,15	110
IKU 18	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
IKU 19	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
IKU 20	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
IKU 21	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75	84,99	113
IKU 22	Indeks Profesionalitas ASN lingkupPangkalan PSDKP Jakarta [Indeks]	72	73,32	102
IKU 23	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90	92,36	103
IKU 24	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	86,67	106
IKU 25	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	Baik [88]	93,24	106

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2020 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Strategis 1, Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas

Pencapaian Sasaran Strategis "Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas" terdiri dari IKU Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) yaitu:

IKU 1 "Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU "Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta" ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut pengaduan atau laporan masyarakat yang berasal dari POKMASWAS melalui SMS Gateway atau langsung ke pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 (dua) pengaduan dari POKMASWAS Hiu Tanjung Karawang terkait penggunaan alat tangkap yang dilarang yaitu *trawl* di sekitar perairan Tanjung Karawang melalui media sosial pada bulan Mei dan Juni 2020. Pengaduan tersebut sudah di tindak lanjut oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dengan diadakannya patroli. Tindak lanjut pengaduan dilaksanakan dengan :

1. Patroli Sp. Napoleon 06 dengan surat tugas 282/Lan.3/TU.421/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 dan didapatkan 4 unit kapal perikanan;
2. Patroli RIB II dengan nomor surat tugas 337/Lan.3/TU.421/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan didapatkan 2 unit kapal perikanan.

Hasil patroli didapatkan 6 kapal yang menggunakan jaring *trawl* untuk selanjutnya disita dan disimpan di dermaga kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta.

Capaian yang diperoleh dari persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS adalah 100%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase jumlah pengaduan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena berbeda target, pada tahun 2019 nilai yang diminta adalah jumlah POKMASWAS yang aktif

sedangkan pada tahun 2020 perhitungan didapat dari persentase jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Berikut capaian persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Capaian Persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

IKU	Target 2020 (%)	Realisasi 2020	Capaian %
Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	70	100	120

Alokasi anggaran untuk IKU Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta sebesar Rp.13.100.000. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.13.100.000 (100%). Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian IKU ini antara lain :

- a. Upaya sosialisasi dan/atau pembinaan terhadap Pokmaswas
- b. Bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat terkait upaya tindak lanjut penanganan pengaduan
- c. Ditetapkannya Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Jakarta

3.2.2 Sasaran Strategis 2, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” yaitu Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha].

IKU 2 "Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]"

Pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar 155 unit pelaku usaha dari target yakni 48 pelaku usaha dengan capaian 120%. Hasil pengukuran 4 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]”, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 10. IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]

NO	SUB IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TW I (%)
		2020	2020	
1.	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang diperiksa terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan	12	55	120
2.	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang diperiksa terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	5	16	120
3.	Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang diperiksa terhadap peraturan perundang – undangan	18	41	120
4.	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa Kepatuhannya	3	17	120
5.	Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>	10	26	120
	Total	48	155	120

Dari data tabel 10, capaian IKU ini sudah mencapai 120% dengan target sebesar 48 pelaku usaha. Sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 155 pelaku usaha sehingga realisasi lebih dari target yang ditentukan.

Pada tahun 2019 IKU ini terealisasi 296 pelaku usaha dari 5 Sub IKU yang terdiri dari 30 pelaku usaha jasa kelautan, 13 pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, 55 unit usaha pemanfaatan ruang laut, 7 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *apendiks cites*, 198 pelaku usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *destructive fishing*. Capaian IKU ini sudah mencapai target yang ditetapkan, adapun terjadi penurunan pada capaian output dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan Sub IKU Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* yaitu kegiatan pemeriksaan kapal < 10 GT.

IKU 2 (dua) “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1) SUB IKU 1. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang diperiksa terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan

SUB IKU 1. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang diperiksa terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni :

- Pelaku usaha pengelolaan produk kelautan
- Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan

Realisasi selama tahun 2020 melebihi target yang ditentukan yaitu 12 pelaku usaha sehingga tercapai 120% dari realisasi tahun 2020 sebesar 55 unit usaha.

Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk kelautan yang dilakukan Pangkalan PSDKP Jakarta meliputi pengawasan usaha pengelolaan pasir laut dan garam. Pengawasan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten. Periode tahun 2020 pengawasan usaha pengelolaan produk kelautan yang diperiksa sebanyak 13 unit usaha.

Pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan selama periode tahun 2020 meliputi pengawasan usaha pengelolaan barang muatan kapal tangkap (BMKT) dan wisata bahari. Pengawasan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang, pandeglang, Indramayu, Pangandaran, Subang, Sukabumi, Kota Cirebon, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Realisasi kegiatan pengawasan ini sebanyak 42 unit usaha. Pada tahun 2020, capaian IKU ini sama dengan tahun 2019 yaitu 120%.

2) SUB IKU 2. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang diperiksa terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

SUB IKU ini didapatkan dari kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Hasil dari pengawasan tersebut didapatkan 16 pelaku usaha dengan capaian pada SUB IKU ini sebesar 120%. Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dilaksanakan di Banten, Jawa barat dan Lampung.

Pada kegiatan ini terdapat 11 pelaku usaha yang dikatakan taat dan 5 unit usaha yang tidak taat. Unit usaha yang tidak taat adalah PT. Tri Patria Bahuga, PT Joncin Agromina Sejahtera, PT. Luxindo Fajar Lau, Green Bay (Samsir), dan Villa Lily (Koh Phicung) karena tidak memiliki perijinan dan kegiatan tambak belum memiliki SIUP.

Pada tahun 2019 SUB IKU ini terealisasi sebanyak 13 pelaku usaha sehingga jika dibandingkan dengan tahun ini mengalami peningkatan dengan jumlah 16 unit usaha pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan karena penambahan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil baru terutama di wilayah provinsi Lampung.

3) SUB IKU 3. Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang diperiksa terhadap peraturan perundang – undangan

SUB IKU ini didapatkan dari pengawasan usaha pemanfaat ruang laut nasional dan pengawasan pencemaran. Hasil dari pengawasan tahun 2020 didapatkan 41 pelaku usaha yang diperiksa. SUB IKU ini telah melebihi dari target yang ditentukan sehingga capaian pada kegiatan ini adalah sebesar 120%.

Pengawasan ruang laut dilaksanakan di Jakarta, Banten, Lampung dan Jawa Barat. Pengawasan ruang laut dilakukan terhadap 41 pelaku usaha yaitu terdiri dari 5 pelaku usaha

terkait pemanfaatan ruang laut nasional dan 36 pelaku usaha perikanan dan non perikanan terkait pencemaran perairan. 2 unit usaha diantaranya dikatakan tidak taat dikarenakan tidak memiliki perizinan yaitu BG Nautika / PT. Nusantara Terminal Terpadu di Pandeglang dan PD. Padi Kapas di Cirebon.

Pada tahun 2020 kegiatan telah memenuhi target, jika dibandingkan dengan tahun 2019, SUB IKU ini mengalami penurunan 14 unit usaha hal ini dikarenakan terdapat kebocoran pengeboran minyak lepas pantai di daerah Karawang, Jawa Barat sehingga pengawasan kegiatan pencemaran sangat masif.

4) SUB IKU 4. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa Kepatuhanannya

Capaian SUB IKU “Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa Kepatuhanannya” sampai dengan tahun 2020 adalah 17 pelaku usaha dengan capaian lebih dari 120 % dengan target adalah 3 pelaku usaha. IKU ini sudah mencapai target tahunan setelah dilakukan pengawasan yakni jenis ikan hias, Pari jenis *Taeniura meyeni*, Jenis karang hias, Sirip hiu jenis *Prionace glauca*, dll. Pengawasan jenis ikan yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

Periode Tahun 2019 Sub IKU ini terealisasi sebesar 7 jenis ikan yang diawasi sedangkan pada tahun 2020, target pengawasan bukan pada jenis ikan akan tetapi pada jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi yaitu sebanyak 17 pelaku usaha dengan 5 jenis ikan yang diawasi sehingga Sub IKU ini tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan target.

5) SUB IKU 5. Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing*

SUB IKU ini telah memenuhi target yaitu 10 pelaku usaha dengan capaian 120%. Periode Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan *Destructive Fishing* terhadap 26 unit kapal yang berada di lokasi Banten, Lampung, dan Jawa barat

Pada periode Tahun 2019 untuk Sub IKU ini terealisasi sebesar 198 unit pelaku usaha sedangkan pada tahun 2020 telah mencapai 26 pelaku usaha dan mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kegiatan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan Sub IKU Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* yaitu kegiatan pemeriksaan kapal < 10 GT.

Alokasi anggaran untuk IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha] sebesar Rp 459.850.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 457.146.850, Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU 2 (120%) dan realisasi anggaran (99,4%) dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien. Hal

tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tidak membayarkan transport lokal untuk lokasi objek pengawasan yang berada dalam kawasan unit kerja.

Efisiensi pengguna sumberdaya juga dilakukan pada kegiatan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha], dengan cara kantor Pangkalan PSDKP Jakarta tidak membayarkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di kawasan muara baru.

3.2.3 Sasaran Strategis 3, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan” yaitu Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha].

IKU 3 "Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pada tahun 2020, IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terealisasi sebesar 100 %.

IKU Jumlah Unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) Sub IKU, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11. IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	SUB IKU	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)
1.	Persentase Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional	100	100	100
2.	Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangan	100	100	100
3.	Persentase Unit Usaha Budidaya hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - undangan	100	100	100
4.	Persentase Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan.	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100

IKU tersebut mendukung 4 (empat) kegiatan Sub IKU yaitu sebagai berikut :

1) SUB IKU 1. Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional

Sub IKU 1 Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional didapatkan dari tahapan pemeriksaan surat perintah tugas, berita acara/form pemeriksaan, dan laporan kegiatan. Penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Perhitungan penilaian kapal perikanan yang taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	
Jumlah Nilai		1	

Berdasarkan manual IKU, kapal perikanan yang diperiksa laik operasional adalah kapal perikanan yang telah memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana pada tabel diatas. Realisasi kapal perikanan yang diperiksa laik operasional sampai dengan tahun 2020 adalah 100% dengan jumlah kapal perikanan yang telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN sebanyak 5923 unit.

Jumlah frekuensi kapal pada aplikasi SIMWASKAN tidak sama dengan data real yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta dikarenakan terdapat data duplikasi pada nama kapal sehingga jumlah kapal perlu diverifikasi kembali secara manual. Hasil verifikasi jumlah kapal yang sesuai didapatkan jumlah sebanyak 4572 unit.

Pemeriksaan kapal perikanan dilakukan dalam rangka penerbitan HPK dan SLO Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Penerbitan HPK dan SLO periode tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 13. Penerbitan HPK dan SLO Periode Tahun 2020 Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No.	Nama Satwas	Jumlah		
		HPK A	HPK B	SLO
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	8801	9674	9311
2	Satwas SDKP Pandeglang	193	308	203
3	Satwas SDKP Serang	618	630	570
4	Satwas SDKP Pesawaran	3054	2977	2977
5	Satwas SDKP Cirebon	1893	2620	2415
6	Satwas SDKP Sukabumi	959	979	836
Total		15518	17188	16312

Pada tahun 2019 Sub IKU ini terealisasi sebesar 4833 unit kapal. Pada tahun 2019 target nilai yang diminta adalah jumlah unit kapal yang diperiksa sedangkan pada tahun 2020 target

nilai berupa persentase sehingga SUB IKU ini tidak bisa dibandingkan karena perbedaan target.

2) SUB IKU 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangan

SUB IKU 2 Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangan didapatkan dari hasil pemeriksaan UPI (Unit Pengolahan Ikan skala besar sebanyak 73 unit usaha dan 28 unit usaha skala kecil. Pengawasan dilakukan di Jawa Barat, Banten, Jakarta dan Lampung.

Realisasi usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada periode tahun 2020 adalah 100% dengan jumlah 101 unit usaha yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN.

Pada tahun 2019 unit usaha yang diperiksa sebanyak 132 unit usaha. Pada tahun 2020 terperiksa sebanyak 101 unit usaha dengan capaian 100%. SUB IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan nilai target.

3) SUB IKU 3. Unit Usaha Budidaya yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undangan

Pengawasan unit usaha budidaya hasil perikanan terdiri dari unit usaha budidaya umum dan air tawar, serta unit usaha budidaya air laut dan air payau. Realisasi unit usaha budidaya yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada periode tahun 2020 adalah 100% dengan jumlah 143 unit usaha yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN.

Pada tahun 2019 unit usaha budidaya yang diperiksa sebesar 73 unit usaha. Pada tahun 2020 SUB IKU ini terperiksa 143 unit usaha dengan capaian 100%. Target pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena capaiannya dalam bentuk persentase bukan jumlah unit usaha.

Nilai capaian didapat dari perbandingan hasil pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) dengan Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksalingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

4) SUB IKU 4. Unit Usaha Distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang - undangan yang berlaku

Realisasi unit usaha budidaya yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada periode tahun 2020 adalah 100% dengan jumlah 180 unit usaha yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan telah dilaporkan pada

aplikasi SIMWASKAN. Distribusi dibagi menjadi 2 yaitu ekspor dan impor. Realisasi ekspor periode sebanyak 39 unit usaha dan ekspor sebanyak 141 unit usaha.

Pada tahun 2019 jumlah unit usaha distribusi diperiksa sebanyak 78 unit usaha, pada tahun 2020 diperiksa 180 unit usaha dengan realisasi 100%. Target pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena capaiannya dalam bentuk persentase bukan jumlah unit usaha.

Pada tahun 2019 nilai yang diminta adalah jumlah pelaku usaha sedangkan pada tahun 2020 nilai yang diminta adalah persentase sehingga IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya dikarenakan perubahan nilai pada target.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp1.056.302.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.047.060.889 (99,1%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,1% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada tahun 2020.

3.3.4 Sasaran Strategis 4, Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 4 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

Tabel 14. Capaian Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

IKU	Target 2020 (%)	Realisasi 2020	Capaian %
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	0,4	0,83	120

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan KP.HIU 10 adalah 0,83. Nilai diperoleh dari perhitungan hari operasi dan jam layar KP. HIU 10.

IKU ini merupakan persentase hasil perbandingan frekuensi operasi kapal pengawas, periode operasi kapal pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm),

kecepatandinas (nm/jam), lama waktu pengawasan (jam), faktorkoreksiaktual WPPNRI, factor koreksiaktual kapal pengawas dengan Luas area WPPNRI.

$$x_{kp} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{wpp} \cdot f_{kp}}{A} \right\} \times 100\%$$

Berikut tabel perhitungan cakupan teoritis dan jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta :

Tabel 15. Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Kapal Pengawas Tahun 2020

No	Nama Kapal	Total Hari	Jam Operasi/ (jam) (t)
1	Hiu 10	93	993
Total			993
Kec. Dinas NM/Jam (v)			15
Jangkauan Efektif Radar (d)			9
Cakupan Teoritis (d x v x t)			134055

Dari data diatas terdapat total jam operasi dari kapal pengawas sebesar 993 jam. Nilai cakupan teoritis diperoleh dari perkalian jangkauan efektif radar (d) dengan nilai ketetapan 9, kecepatan dinas NM/Jam (v) dengan nilai ketetapan 15, dan lama waktu pengawasan (t) yaitu 993 jam. Dari nilai diatas diketahui nilai cakupan teoritis sebesar 134055. Nilai tersebut menjadi dasar perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16. Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas

Cakupan Teorotis (CT)	134055
Faktor Koreksi Aktual WPPNRI (Fwpp)	0,4
Faktor Koreksi Aktual Kapal Pengawas (Fkp)	0,3
$\frac{CT \times Fwpp \times Fkp}{\text{Luas WPPNRI}} \times 100\%$	Aktual = 16086,6 -----x100% 1928506
Nilai Persentase	0,83%

Dari tabel diatas diketahui persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 0,83%. Realisasi periode ini sudah

memenuhi lebih dari target yaitu 0,4% sehingga dapat disimpulkan persentase lebih dari 100%. IKU ini merupakan kegiatan baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 5.143.322.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.882.698.117,- (94,9%). Berdasarkan anggaran yang terealisasi terdapat efisiensi yaitu bertambahnya hari operasi dan melebihi target yang telah

3.3.5 Sasaran Strategis 5, Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 5 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/ Rubberboat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

Tabel 17. Capaian Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat

IKU	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian %
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	0,104	0,35	120

Berikut tabel perhitungan cakupan teoritis dan jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta :

Tabel 18. Hasil Operasi dan Cakupan Teoritis Speedboat/RIB/Rubberboat Tahun 2020

No	Nama Kapal	Total Hari	Jam Operasi/ (jam) (h)
1	Dolphin 04	42	251
2	Dolphin 22	30	183
3	Napoleon 06	43	278
4	Napoleon 14	25	193
5	Napoleon 52	35	222
6	RIB Pangkalan	9	51
7	Sea Rider	43	289
8	Rubber Boat	35	227
	Total		1694
	Kec. Dinas NM/Jam (v)		10
	Jangkauan Efektif Radar (d)		4
	Cakupan Teoritis (d x v x h)		66760

IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) merupakan nilai dari perbandingan frekuensi operasi *Speedboat* Pengawas, periode operasi *Speedboat* Pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual *Speedboat* dengan Luas area WPPNRI.

$$x_{sb} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{sb}}{A} \right\} \times 100\%$$

Dari data diatas terdapat total jam operasi dari speedboat sebesar 1694 jam. Nilai cakupan teoritis diperoleh dari perkalian jangkauan efektif radar (d) dengan nilai ketetapan 4, kecepatan dinas NM/Jam (v) dengan nilai ketetapan 10, dan jam operasi (h) yaitu 1694 jam. Dari nilai diatas diketahui nilai cakupan teoritis sebesar 66760. Nilai tersebut menjadi dasar perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19. Perhitungan Persentase Cakupan WPPNRI *Speedboat/RIB/Rubberboat*

Cakupan Teoritis (CT)	66760
Faktor Koreksi Aktual Speedboat (Fsb)	0,1
$\frac{CT \times Fsb}{\text{Luas WPPNRI}} \times 100\%$	Aktual = 6676 -----x100% 1928506
Nilai Persentase	0,35%

Dari tabel diatas diketahui persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 0,35%. Realisasi periode ini sudah memenuhi lebih dari target yaitu 0,104% sehingga dapat disimpulkan persentase lebih dari 120%. IKU ini merupakan kegiatan baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp1.257.723.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.210.117.739,- (96,21%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 96,21% terdapat efisiensi yaitu bertambahnya hari operasi *Speedboat/RIB/Rubberboat* yang melebihi target dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

3.3.6 Sasaran Strategis 6, Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 6 “Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)”

Tabel 20. Capaian Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP

IKU	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian %
Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	100	120

Laporan pemantauan SPKP dilaksanakan setiap semester sehingga sampai dengan periode realisasi persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP sebesar 120 %.

Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP tahun 2020 adalah 100%. Nilai tersebut lebih dari target yaitu 70%. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019, karena termasuk IKU baru.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp 58.000.000, dan telah terealisasi sebesar Rp. 56.981.150,- (98,2%).

3.3.7 Sasaran Strategis 7, Terselenggaranya perawatan kapal pengawas

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya perawatan kapal pengawas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 7 “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)”.

Jumlah Armada Kapal Pengawas yang beroperasi pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta periode tahun 2020 sebanyak 1 unit. Capaian tahun 2020 ini lebih rendah dari realisasi tahun 2019 yaitu 4 kapal karena 3 kapal pengawas diserahkan ke BRSDMKP yaitu KP. Barracuda 01, KP Barracuda 02 dan KP. Takalamungan. Selama periode Kapal Pengawas Hiu 10 melaksanakan perbaikan tahunan di PT. Proskuneeo Kadarusman pada bulan November 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 5.143.322.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.882.698.117,- (94,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu masing-masing Nakhoda/KKM/Operator Speedboat untuk menyusun laporan kondisi kapal yang diserahkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta cq Kepala seksi sarana dan prasarana sehingga segala kerusakan sudah dapat diantisipasi dengan baik dan menggunakan aplikasi perawatan dari POA yaitu SIRIKA.

3.3.8 Sasaran Strategis 8, Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 8 “Jumlah Speedboat/RIB/Rubberboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)”

Jumlah Speedboat/RIB/Rubberboat yang beroperasi pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta periode tahun 2020 sebanyak 8 unit dan sesuai dengan target tahun 2020. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Rincian kapal pengawas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)

IKU	Target 2020	Realisasi Operasi (hari)	Capaian TW IV (%)
		2020	
Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (unit)	8	8	100

Selama periode tahun 2020 IKU jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terealisasi 8 unit. Capaian sampai dengan tahun 2020 adalah 100%.

Pada tahun 2019, Capaian sama dengan tahun 2020 yaitu 8 speedboat yang siap operasi. Berikut tabel kesiapan speedboat selama tahun 2020 :

Tabel 22. Kesiapan Speedboat/RIB/Rubberboat

NO	Nama Speedboat	Kesiapan	Lokasi
1	Napoleon 006	Siap	Pangkalan PSDKP Jakarta
2	Napoleon 014	Siap	Satwas SDKP Pesawaran
3	Napoleon 052	Siap	Satwas SDKP Sukabumi
4	Dolphin 004	Siap	Satwas SDKP Serang
5	Dolphin 022	Siap	Satwas SDKP Cirebon
6	Sea Rider	Siap	Pangkalan PSDKP Jakarta
7	Rubber Boat	Siap	Satwas SDKP Pandeglang
8	RIB 2	Siap	Pangkalan PSDKP Jakarta

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp1.257.723.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.210.117.739,- (96,2%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu masing-masing

Nakhoda/KKM/Operator Speedboat untuk menyusun laporan kondisi kapal yang diserahkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta cq Kepala seksi sarana dan prasarana sehingga segala kerusakan sudah dapat diantisipasi dengan baik dan menggunakan aplikasi perawatan dari POA yaitu SIRIKA.

3.3.9 Sasaran Strategis 9, Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 9 :

IKU 9 “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)”.

Tabel 23. Rekapitulasi jumlah kapal perikanan yang diperiksa dengan kapal pengawas

IKU	Target 2020	Realisasi riksa kapal (unit)	Capaian 2020 (%)
		2020	
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90	113	120

Dari data diatas diketahui total hari operasi sampai dengan tahun 2020 adalah 113 unit kapal. Capaian pada adalah 120%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 5.143.322.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.882.698.117,- (94,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yaitu

1. Penyusunan dokumen Rencana Operasi untuk setiap pelaksanaan operasi KP/SP sehingga Target Kapal yang akan diperiksa dan Lokasi Kapal Perikanan yang akan diperiksa sudah diperhitungkan;
2. Penggunaan Data dan Informasi dalam pelaksanaan operasi pengawasan seperti : Data SPKP, data koordinat pemeriksaan kapal yang melanggar di Tahun 2019, informasi dari Pokmaswas dan Instansi terkait sehingga pelaksanaan operasi tidak lagi menggunakan sistem gergaji laut.

IKU 10 “Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)”

Kapal pengawas yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 1 unit yaitu KP. HIU 10. Pada periode tahun 2020 untuk jumlah hari operasi kapal pengawas di lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah terealisasi 93 hari.

Tabel 24. Capaian IKU Jumlah hari operasi Kapal Pengawas

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi	Capaian 2020 (%)
		2020	
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (hari operasi)	90	93	103

Dari tabel diatas diketahui IKU ini terealisasi 93 hari operasi dengan capaian 103%. Periode triwulan I dan II kapal pengawas HIU 10 tidak beroperasi dikarenakan *general overhaul main engine*, dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2020. Realisasi IKU ini menurun dari realisasi pada periode Tahun 2019 yaitu 98 hari dikarenakan pada KP. HIU 10 pada bulan Januari – Agustus 2020 tidak beroperasi.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 5.143.322.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.882.698.117,- (94,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yaitu

1. Penyusunan dokumen Rencana Operasi untuk setiap pelaksanaan operasi KP/SP sehingga Target Kapal yang akan diperiksa dan Lokasi Kapal Perikanan yang akan diperiksa sudah diperhitungkan;
2. Penggunaan Data dan Informasi dalam pelaksanaan operasi pengawasan seperti : Data SPKP, data koordinat pemeriksaan kapal yang melanggar di Tahun 2019, informasi dari Pokmaswas dan Instansi terkait sehingga pelaksanaan operasi tidak lagi menggunakan sistem gergaji laut.

3.3.10 Sasaran Strategis 10, Terselenggaranya Operasi Speedboat Pengawas

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 10 :

IKU 11 “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)”

Tabel 25. IKU jumlah kapal perikanan yang diperiksa speedboat/RIB/Rubberboat

IKU	Target 2020	Realisasi riksa kapal (unit)	Capaian 2020 (%)
		2020	
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	180	574	120

Tabel 26. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kapal menggunakan Speedboat/RIB/Rubberboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Hari Operasi	Riksa	Adhock
1	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	35	61	-
2	Napoleon 014	Pangkalan PSDKP Jakarta	25	50	-
3	Napoleon 006	Satwas SDKP Pesawaran	43	70	7
4	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	42	91	2
5	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	30	138	6
6	Rubber Boat	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	80	-
7	Sea Rider	Satwas SDKP Pandeglang	43	71	3
8	RIB 2	Pangkalan PSDKP Jakarta	9	13	3
Jumlah			262	574	21

Dari data pada tabel diatas diketahui total hari operasi *Speedboat/RIB/Rubberboat* sampai dengan tahun 2020 adalah 262 hari. Jumlah kapal yang diperiksa selama periode sebanyak 574 kapal. Dari kapal yang diperiksa terdapat 21 kapal yang di adhock, alat tangkap yang digunakan disita karna menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp1.257.723.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.210.117.739,- (96,2%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yaitu :

1. Penyusunan dokumen Rencana Operasi untuk setiap pelaksanaan operasi KP/SP sehingga Target Kapal yang akan diperiksa dan Lokasi Kapal Perikanan yang akan diperiksa sudah diperhitungkan;
2. Penggunaan Data dan Informasi dalam pelaksanaan operasi pengawasan seperti : Data SPKP, data koordinat pemeriksaan kapal yang melanggar di Tahun 2019, informasi dari Pokmaswas dan Instansi terkait sehingga pelaksanaan operasi tidak lagi menggunakan sistem gergaji laut.

IKU 12 “Jumlah hari operasi speedboat/RIB/Rubberboat UPT Pangkalan PSDKP Jakarta”

Dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* di laut selain armada kapal Pengawas, UPT Pangkalan PSDKP Jakarta juga mempunyai armada lainnya, seperti speedboat/RIB dan Rubberboat. Armada tersebut terdapat di UPT Pangkalan PSDKP Jakarta dan tersebar di Satwas PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Pangkalan PSDKP Jakarta juga melakukan kerjasama patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Rincian *speedboat/RIB* dan *Rubberboat* tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Capaian jumlah hari operasi *speedboat/RIB/Rubberboat*

IKU	Target 2020	Realisasi Operasi (hari)	Capaian 2020 (%)
		2020	
Jumlah hari operasi <i>speedboat/RIB/Rubberboat</i> UPT Pangkalan PSDKP Jakarta	24	33	120

Jumlah rata-rata hari operasi *speedboat/RIB/Rubberboat* pada periode tahun 2020 adalah 33 hari. Capaian jumlah hari operasi sampai dengan tahun 2020 adalah 120%. Capaian pada tahun 2019 yaitu 44 hari sehingga hari operasi tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran terkait adanya pandemic Covid-19.

Tabel 28. Rekapitulasi Hasil Operasi per masing-masing *Speedboat/RIB/Rubberboat*

No	Nama Kapal	Lokasi	Hari Operasi
1	Napoleon 052	Pangkalan PSDKP Jakarta	35
2	Napoleon 006	Satwas SDKP Sukabumi	25
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Serang	43
4	Dolphin 004	Satwas SDKP Cirebon	42
5	Dolphin 022	Pangkalan PSDKP Jakarta	30
6	Rubber Boat	Satwas SDKP Pandeglang	35
7	Sea Rider	Pangkalan PSDKP Jakarta	43
8	RIB 2	Satwas SDKP Pesawaran	9
	Jumlah		262
	Rata-rata		33

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp1.257.723.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.210.117.739,- (96,2%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU ini terdapat efisiensi yaitu bertambahnya hari operasi dan melebihi target yang telah ditentukan.

3.3.11 Sasaran Strategis 11, Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan

Dalam rangka pencapaian SS “Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 11 :

IKU 13 “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (orang)”

Tabel 29. IKU jumlah awak kapal pengawas perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin

IKU	Target 2020	Realisasi	Capaian 2020 (%)
		Operasi (hari) 2020	
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (orang)”	34	38	112

Pemeriksaan kesehatan rutin adalah kegiatan setiap tahun yang di lakukan untuk mengetahui kesehatan setiap pegawai pada lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta khususnya bagi Awak Kapal Pengawas agar tetap bugar dan sehat baik fisik maupun mental melalui program Medical Check up. Sampai dengan periode tahun 2020 IKU ini sudah terealisasi sebanyak 31 orang dengan Surat Perintah Tugas nomor : 1087/Lan.3/TU.421/XIV/2020 tanggal 24 Agustus 2020, 1109/Lan.3/TU.421/XIV/2020 tanggal 25 Agustus 2020, 1119/Lan.3/TU.421/XIV/2020 tanggal 26 Agustus 2020, 1151/Lan.3/TU.421/XIV/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan 1176/Lan.3/TU.421/IX/2020 tanggal 4 September 2020, dan 1632/Lan.3/TU.421/IX/2020 tanggal 10 November 2020 .

Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 51.300.000,- dan sampai dengan bulan September 2020 sudah terealisasi sebesar Rp. 49.100.000,- (95,7%).

3.3.12 Sasaran Strategis 12, Terselenggaranya Penyidikan TPKP

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Penyidikan TPKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 12 :

IKU 14 “Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”.

Tabel 30. IKU Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP

IKU	Target 2020	Realisasi	Capaian 2020 (%)
		2020	
Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

Pencapaian target indikator kinerja adalah jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel pada UPT Pangkalan PSDKP Jakarta. Pada tahun 2020 tidak terdapat kasus yang diproses, sehingga perhitungan dianggap 100%.

Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 34.852.000,-.

3.3.13 Sasaran Strategis 13, Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal

Dalam rangka pencapaian SS “Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal”, berikut beberapa IKU yang menunjang SS 13 :

IKU 15 “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Tabel 31. Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk

IKU	Target 2020	Realisasi	Capaian 2020 (%)
		2020	
Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta 100%. Pada tahun 2020 tidak terdapat penanganan barbuk karena tidak ada kasus selama periode , sehingga perhitungan dianggap 100%.

Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 34.000.000,- sampai dengan telah terealisasi sebesar Rp. 23.509.695,- (69,15%). Anggaran digunakan untuk pembayaran sewa *coldstorage* dalam rangka penitipan barang bukti untuk kasus atas nama tersangka Ucok Taman dan Mikie Hidayat atas kasus kepiting bertelur tahun 2019.

IKU 16 “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Tabel 32. Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

IKU	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93	93	100

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan sebesar 100%. Pada tahun 2020 tidak terdapat penyelesaian penanganan awak kapal karena tidak ada kasus, sehingga perhitungan dianggap 100%.

Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2020 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 10.500.000,-.

3.3.14 Sasaran Strategis 14, Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU 17 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]”

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Survey kepuasan masyarakat terdiri dari 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dari 9 (sembilan) unsur diatas, diperoleh nilai interval konversi SKM sebesar 90,23 dengan mutu pelayanan A dan dinyatakan kinerja unit pelayanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta adalah Baik. Survey dilakukan terhadap pengguna jasa pelayanan SLO sebanyak 56 orang di pos pelayanan muara angke, muara baru dan masing-masing satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]” periode tahun 2020 sebesar 88,15. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan 3 kali yaitu semester I, triwulan III, dan Triwulan IV. Hasil survey disajikan pada tabel 33 :

Tabel 33. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

NO	PERIODE	NILAI
1	Semester I	84,59
2	Triwulan III	89,64
3	Triwulan IV	90,23
Jumlah		264,46
Rata-rata		88,15

IKU 18 “Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

IKU ini merupakan Layanan Dukungan Manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu output dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

a) Dukungan penyusunan rencana program dan rencana anggaran;

Telah dilakukan kegiatan penyusunan rencana program dan rencana anggaran tahun 2021, revisi anggaran 2020

b) Dukungan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;

Telah dilaksanakan penyusunan laporan kegiatan yang meliputi :

- Laporan tahun 2019
- Laporan kinerja tahun 2019, triwulan I-III tahun 2020
- Laporan kegiatan bulan Desember 2019 – November 2020

c) Dukungan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

Telah dilaksanakan penyusunan laporan keuangan yang meliputi :

- Laporan semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020
- Laporan triwulan I dan III tahun 2020
- Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan Desember 2019 - November 2020

d) Dukungan pengelolaan kepegawaian;

Telah dilaksanakan penyusunan laporan evaluasi SOP, laporan evaluasi jabatan, laporan anjab, laporan analisis beban kerja, keikutsertaan dalam penilaian DUPAK jabatan fungsional

e) Dukungan Pelayanan.

Telah dilaksanakan bimtek, diklat, forum konsultasi publik, pengadaan seragam, dan pembangunan zona integritas.

Sampai dengan tahun 2020 kelima komponen diatas sudah teralisasi, sehingga IKU dikatakan telah mencapai 100%. IKU ini merupakan kegiatan baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi Anggaran untuk IKU ini sebesar Rp. 592.906.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 577.260.444,- (97,4%).

IKU 19 “Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

IKU ini merupakan pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu output dari kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PSDKP yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Realisasi pengadaan kendaraan bermotor lingkup Satker Pusat;
 1. Pengadaan kendaraan roda 4 dengan pagu Rp. 455.798.000,- terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,- dan penyedia oleh PT. Astra Internasional, Tbk pada tanggal 10 Maret 2020;
 2. Pengadaan kendaraan roda 2 dengan pagu Rp. 24.000.000,- terelasisasi sebesar Rp. 23.100.000,- dan penyedia oleh PT. Batavia Bintang Berlian pada tanggal 28 Februari 2020.
- b. Realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi lingkup Satker Pusat;
Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi dengan pagu Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.790.000,- dan penyedia oleh PT. Airmas Perkasa Ekspres pada tanggal 12 Februari 2020.
- c. Realisasi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran lingkup Satker Pusat.
Pengadaan fasilitas perkantoran dengan pagu Rp. 60.000.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 58.000.000,- dan penyedia oleh CV. Printama Lasari Tekinfo pada tanggal 23 Juni 2020.

Sampai dengan tahun 2020 ketiga komponen diatas sudah teralisasi, sehingga IKU dikatakan telah mencapai 100%. Alokasi anggaran pada IKU ini sebesar Rp. 1.022.860.000,- dan telah terealisasi sebesar 981.733.000,- (96%). IKU ini merupakan kegiatan baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU 20 “Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

IKU ini merupakan pemenuhan layanan perkantoran lingkup Satker Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu output dari kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PSDKP, yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

- a) Realisasi Gaji dan Tunjangan lingkup Satker Pangkalan PSDKP Jakarta
- b) Realisasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor lingkup Satker Pangkalan PSDKP Jakarta

Gaji dan tunjangan telah dibayarkan tepat waktu selama periode serta operasional dan pemeliharaan kantor telah terealisasi sehingga IKU sudah mencapai target dengan capaian 100%. IKU ini merupakan kegiatan baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk IKU ini sebesar Rp. 17.853.034.000,- dan sampai dengan bulan September 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 16.788.778.766,- (94%).

IKU 21 “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta merupakan salah satu UPT yang di canangkan menuju WBK dengan hasil penilaian dari Tim Penilai Internal KKP (nilai >75).

Berdasarkan pada penilaian tahun 2019 Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi syarat perdikat WBK yakni > 75 yaitu dengan nilai sebesar 82,74. Atas penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta diberikan penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). sehingga IKU ini telah tercapai pada tahun 2020.

Pada periode tahun 2020, Pangkalan PSDKP Jakarta kembali menjadi unit kerja yang akan dilakukan penilaian. Hasil penilaian WBK pada oleh Inspektorat Jenderal dan Sedtitjen sebesar 84,99 sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi batas nilai WBK yaitu 75. Capaian pada IKU ini sebesar 113% sehingga IKU ini telah tercapai pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun ini mengalami peningkatan.

IKU 22 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta ini merupakan IKU baru, pada tahun 2017 dan 2018 IKU ini bernama “Indeks Kompetensi dan Integritas Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan pengukuran dari 4 variabel yaitu sebagai berikut :

1. Persentase pejabat/staf yang mengikuti assesment
2. Persentase capaian output pegawai pada SKP
3. Persentase tingkat kehadiran pegawai
4. Persentase LHKPN/LHKASN

Pada periode tahun 2020, SS-3 bernama “indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 72. Pengukuran berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4) Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada 2020. Sampai dengan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui finger print online.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Pengukuran IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun. Nilai yang diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta adalah 73,32 dengan target tahunan 72 sehingga capaian yang diperoleh adalah 102%.

Pada tahun 2019 nilai indeks profesional ASN adalah 71,05 jika dibandingkan dengan tahun 2020 nilai indeks profesional ASN meningkat.

IKU 23 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan : dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek kesesuaian : dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek ketercapaian : dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

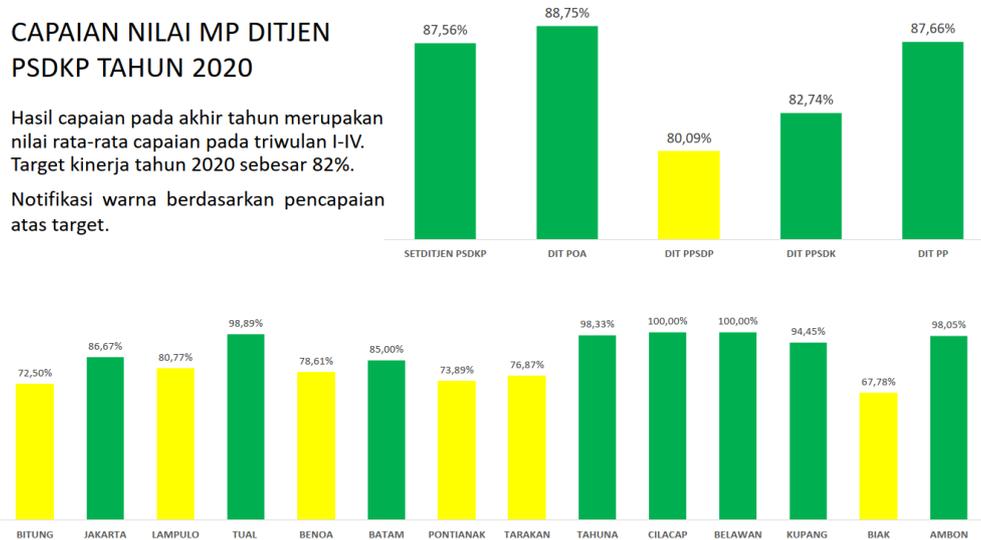
Penilaian rekonsiliasi dilaksanakan pada bulan 26 November 2020 oleh Biro Perencanaan selama 3 hari. Berdasarkan kertas kerja rekonsiliasi kinerja tahun 2020 Pangkalan PSDKP Jakarta mendapatkan nilai 92,36 sehingga capaian IKU ini sebesar 103%.

Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU 24 “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Sementara itu, Pangkalan PSDKP Jakarta telah memiliki media sosial sebagai alat informasi dan komunikasi.

Media sosial yang dimiliki Pangkalan PSDKP Jakarta antara lain yaitu Facebook (pangkalan.jakarta), Instagram (pangkalan_psdkp_jkt) dan Twitter (pangkalan_jkt). Media sosial tersebut berisikan kegiatan dan informasi pengawasan SDKP yang telah dilaksanakan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.



Gambar 6. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PSDKP

Kegiatan utama yang dilakukan sebagai bentuk penyediaan informasi kepada publik, Pangkalan PSDKP Jakarta senantiasa melakukan updating informasi program kegiatan dan kinerja pengawasan SDKP yang terbaru melalui Media sosial Pangkalan PSDKP Jakarta. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen; ⁽²⁾Keikutsertaan ⁽³⁾Keaktifan. Capaian periode tahun 2020 adalah 86,67% dengan capaian sebesar 106% karena target setiap triwulan adalah 82%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 92,5% maka tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

IKU 25 “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 13 (tiga belas) komponen capaian yaitu pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal IVI DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Penyerapan Anggaran, Pagu minus dan Dispensasi SPM.

Rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total)(Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	175	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	66.66	100.00	100.00	100.00	92.00	100.00	89.89	100.00	76.70	99.85	0.00	90.00	88.58	95%	93.24
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	3.33	5.00	15.00	8.00	4.60	5.00	13.48	12.00	7.67	4.99	0.00	4.50			
				Nilai Aspek	88.89			98.00				91.61				90.00				

Disclaimer:

- 1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN.
- 2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam [S-614/PB/2020](#) tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).

Gambar 7. Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta

Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Realisasi Nilai Kinerja Pangkalan PSDKP merupakan hasil pembagian nilai total dengan konversi bobot yaitu 93,24. Capaian periode ini adalah 120%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor 07888/PSDKP.0.1.1/RC.420/IV/ 2020 tanggal 09 April 2020 tentang revisi anggaran dalam rangka perubahan postur anggaran KKP tahun 2020 dan surat penghematan anggaran dalam rangka penanganan covid 19 tanggal 17 April 2020. Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta setelah revisi menjadi Rp. Rp 33.396.441.000,- dari sebelumnya adalah Rp. 55.222.271.000,-.

Pada tanggal 05 Agustus 2020 terdapat perubahan pagu dan pergeseran pagu anggaran antar satker, antar wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang disahkan oleh Kementerian Keuangan melalui surat usulan revisi anggaran nomor 021/Lan.3/RC.420/VIV/2020 dan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2020 pagu Pangkalan PSDKP Jakarta berubah menjadi Rp. 32.231.816.000.

Realisasi Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 30.649.459.251,- atau sebesar 95,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp 32.231.816.000,- dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 34. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan Tahun 2020

No	Kode Akun	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	11.183.539.000	10.773.669.607	96,3
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	63.325.000	23.809.695	37,6
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	459.850.000	457.146.850	99,4
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.056.302.000	1.047.060.889	99,4
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	19.468.800.000	18.347.772.210	94,1
Total			32.231.816.000	30.649.459.251	95,09



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode Tahun 2020 Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Sebagian besar hasil capaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. IKU yang tinggi dari 120% ada berapa IKU yaitu IKU 2, IKU 4, dan IKU 5. Pada IKU 6 yaitu IKU pemantauan SDKP terdapat perhitungan IKU kurang jelas/kurang memenuhi kaidah SMART sehingga operator kesulitan dalam mengukur dan menginput capaian kinerja.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk tahun 2020 adalah perlu ditinjau kembali untuk IKU yang capaiannya sangat tinggi yaitu :

- IKU 2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta [pelaku usaha]
- IKU 4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)

- IKU 5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)
- IKU 11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat* (unit)
- *Sms Gateway* dari POA belum disampaikan secara *real time*. Sehingga pengaduan yang diterima Pangkalan PSDKP Jakarta tidak bias ditindak lanjuti.
- Koordinasi ke Dit. SDP Menyempurnakan Aplikasi SIMWASKAN
- Koordinasi kepada Dit. POA untuk memperbaiki terkait perhitungan IKU pemantauan

4.3 Tindak Lanjut

Pegawai sudah mulai aktif dalam pengoperasian aplikasi Bitriks KKP sehingga nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2020 telah memenuhi target dan meningkat dari triwulan sebelumnya.